

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Galang Dicky Setiawan  
NPP. 30.0676

*Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Keuangan Publik*  
Email: galang.dicky20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Haromin., S.Sos., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** In carrying out its responsibilities, the local government is accountable for its financial performance to the public through the Local Government Financial Statements (LKPD). The LKPD is audited by the Supreme Audit Agency (BPK) to assess its quality, including its financial aspects, performance, and specific matters. The local government needs to make maximum efforts to obtain an Unqualified Opinion (WTP). The financial statements that receive a WTP opinion are those presented fairly and comply with the accounting standards applicable in Indonesia, specifically Law Number 15 of 2004. Central Java obtained a 100% "Unqualified Opinion" in 2012, and it was maintained until 2021, which is an achievement as it had not been previously achieved by the Provincial Government of Central Java. Similarly, Semarang District consistently received an Unqualified Opinion from 2012 to 2021, indicating that its financial statements align with the established accounting principles, particularly in terms of managing and being responsible for state finances. The achievement of this opinion needs to be maintained. Despite of that, there are still issues in asset management, as evidenced by only 30% of the total 5,164 assets owned by the district government having been certified. In 2020, a certification request for 1,700 asset areas was submitted to the National Land Agency (BPN), with a target of obtaining 2,000 certificates. **Purpose:** To optimize the management of fixed assets by the Regional Financial and Asset Management Board (BKUD) in maintaining the Unqualified Opinion on the LKPD. Additionally, the study aims to identify the factors hindering asset management and the efforts made by BKUD to maintain the Unqualified Opinion on the LKPD in Semarang District. **Method:** This research employs a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include triangulation through interviews, qualitative observations, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman data analysis model. **Result:** The findings of this research indicate that the implementation of fixed asset management in Semarang District is already optimal, despite some obstacles and challenges. The obstacles faced by BKUD include difficulties in obtaining documentary evidence of ownership for the fixed assets owned by the Semarang District Government, insufficient staff numbers for asset management, a lack of competent human resources to operate the Regional Financial Management Information System (SIPKD). **Conclusion:** Although the implementation of fixed asset management in Semarang District is relatively good, there are still challenges, particularly regarding the availability of complete documentation. To address these challenges, BKUD can collaborate with the National Land Agency (BPN) to process land certificate regularization.

**Keywords:** Fixed Assets, Asset Management, Asset Administration

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). LKPD akan diperiksa oleh BPK atas tugasnya dalam melakukan pemeriksaan yakni diantaranya keuangan, kinerja dan hal tertentu dengan melihat kualitas LKPD. Upaya maksimal perlu dilakukan pemerintah daerah agar bisa memperoleh opini WTP. Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP ini ialah laporan keuangan yang disajikan dengan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang- undang nomor 15 tahun 2004. Jawa Tengah mendapatkan opini hasil audit: 100% “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Jawa Tengah menyusul dan mempertahankannya sampai tahun 2021, hal ini merupakan suatu prestasi karena sebelumnya belum pernah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Kabupaten Semarang sendiri selalu mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2012 hingga 2021 yang berarti laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan yaitu mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perolehan opini tersebut harus dipertahankan. Bersumber dari Kompas.com Pada Kabupaten Semarang sendiri meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset dibuktikan dengan aset Pemkab semarang yang bersertifikat baru 30% dari Total 5.164 aset. Pada tahun 2020 sudah diajukan permohonan pensertifikatan untuk 1.700 bidang aset Pemkab ke BPN dengan target sebesar 2.000 sertifikat. Oleh karna itu diperlukan optimalisasi pengelolaan aset guna mempertahankan opini wtp yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan aset tetap oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD opini WTP, mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD WTP di Kabupaten Semarang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data triangulasi yaitu dengan wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui model analisis data miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang sudah optimal meski ada beberapa hambatan ataupun kendala. Hambatan yang dialami oleh BKUD yaitu sulitnya mendapatkan dokumen bukti kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengelolaan aset tetap, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Koneksi jaringan dan SIPKD sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan. **Kesimpulan:** pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang sudah cukup baik di Kabupaten Semarang masih memiliki kendala, utamanya yakni kelengkapan dokumen yang susah didapat. Upaya yang dapat dilakukan oleh BKUD yakni dnegan melakukan kerjasama dengan BPN untuk memproses penertiban sertifikat tanah yang dimana proses penerbitan sertifikat.

**Kata kunci:** Aset Tetap, Penatausahaan,dan Pengelolaan Aset

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Salah satu pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada publik salah satunya dengan melakukan LKPD. BPK dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan beberapa pemeriksaan diantaranya adalah keuangan, kinerja, dan hal-hal yang memiliki jujuan tertentu yang berstandar pada peraturan yang dimiliki Negara. BPK akan menilai bagaimana kualitas LKPD dengan cara mengaudit setiap hari. Ada 4 jenis opini hasil audit yang dilakukan oleh BPK. 4 opini tersebut diantaranya adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP/Unqualified Opinion, opini wajar dengan pengecualian atau WDP/Qualified Opinion, opini tidak wajar atau TW/Adverse, dan juga opini yang tidak menyatakan pendapat atau TMP/*Disclaimer*.

Upaya maksimal perlu dilakukan pemerintah daerah agar bisa memperoleh opini WTP. Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP ini ialah laporan keuangan yang disajikan dengan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Isu yang nyaring di kalangan pemangku kekuasaan daerah seperti Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, bahkan Presiden adalah pencapaian opini WTP dari BPK mengenai LKPP, dan juga Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Hal tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah bahwa opini WTP harus mencapai angka 15% pada tahun 2015. Ada beragam masalah yang yang dapat menghambat dalam mendapatkan opini WTP. Khusus Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), masalah yang sering ditemui yaitu seputar pengelolaan kas, pengelolaan aset yang belum akuntabel, dan juga persediaan investasi permanen dan non-permanen.

Jawa Tengah mendapatkan opini hasil audit: 100% “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Jawa Tengah menyusul dan mempertahankannya sampai tahun 2021, hal ini merupakan suatu prestasi karena sebelumnya belum pernah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Kabupaten Semarang sendiri selalu mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2012 hingga 2021 yang berarti laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan yaitu mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perolehan opini tersebut harus dipertahankan. Bersumber dari kompas.com pada Kabupaten Semarang sendiri meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset dibuktikan dengan aset Pemkab Semarang yang bersertifikat baru 30% dari Total 5.164 aset. Pada tahun 2020 sudah diajukan permohonan pensertifikatan untuk 1.700 bidang aset Pemkab ke BPN dengan target sebesar 2.000 sertifikat. Oleh karna itu diperlukan optimalisasi pengelolaan aset guna mempertahankan opini WTP yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama ini.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset yang biasa ditemui di Pemerintahan Daerah di Indonesia, khususnya di Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengelolaan aset bisa dikatakan sulit. Afani (2002) menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat proses pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah dokumen atas perolehan aset yang tidak lengkap, rendahnya Sumber Daya Manusia yang belum memiliki skill untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sehingga proses inventarisasi menjadi terhambat, tidak lengkapnya kuitansi yang berisikan catatan nilai perolehan suatu barang, minimnya pemahaman masyarakat terkait dasar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, tidak stabilnya jaringan SIMDA

BMD. Selain itu, belum tersedianya jaringan Local Area Network menjadikan aplikasi tersebut belum merata dan hanya bisa diakses di kantor BKUD, dan para pengguna aplikasi tersebut seringkali mengalami kesulitan log in karena server down. Factor-faktor tersebut yang menjadikan perolehan opini WTP menjadi terhambat.

Begitu halnya dengan kasus yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Beberapa temuan BPK yang menjadi permasalahan di daerah adalah aset tetap yang keberadaannya tidak diketahui. Aset tersebut diantaranya Gedung, tanah, jalan, jaringan, irigasi serta beberapa aset Gedung yang tidak memiliki dokumen pendukung yang tidak jelas tahun perolehannya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Afni Nooraini berjudul Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Afni Nooraini, 2022), Penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan terdapat aset tetap, faktor penghambat dan pendukung pengelolaannya, dan juga cara yang digunakan BKUD untuk mewujudkan opini WPT di Kabupaten Timor Tengah Utara.. Pada pelaksanaannya, penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lalu Ade Gusnawan Putra yang berjudul Strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lalu Ade, 2022), Hasil dari penelitian ini adalah strategi untuk meningkatkan kualitas LKPD, peningkatan efektivitas tindak lanjut yang direkomendasikan BPK melalui penyesuaian yang dilakukan pada LKPD dan juga menciptakan suatu program hukun yang menjadi acuan untuk mengendalikan intern. Hasil tersebut didapatkan melalui penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selanjutnya penelitian dari Hadinur Rahman yang berjudul Pengelolaa Aset Daerah dalam Rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar (Hadinur Rahman, 2020), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian in yaitu dengan melakukan dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa asepek yang dapat berpengaruh terhadap cara mempertahankan WTP. Aset tersebut adalah pemahama dan pengetahuan SDM mengenai cara mengelola aset tetap.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana BKUD Kabupaten Semarang dalam melakukan optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan opini WTP yang sudah didapat selama lebih dari satu decade atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPDnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Doli D. Siregar (Siregar, 2016) mengenai penatausahaan dan pengamanan aset/barang milik daerah.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi pengelolaan aset tetap sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Tengah.

## II. METODE

Hasil dari penelitian ini adalah strategi untuk meningkatkan kualitas LKPD, peningkatan efektivitas tindak lanjut yang direkomendasikan BPK melalui penyesuaian yang dilakukan pada LKPD dan juga menciptakan suatu program hukun yang menjadi acuan untuk mengendalikan intern. Hasil tersebut didapatkan melalui penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset, serta Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan Aset. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi aset tetap yang digagas oleh Doli D. Siregar (Siregar, 2016) mengenai penatausahaan dan pengamanan aset/barang milik daerah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Semarang

Pada pembahasan ini dengan berpedoman pada teori Siregar (2016:91) yang membagi manajemen atau pengelolaan aset tetap dalam 5 (lima) tahapan. 5 (tahapan) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Inventarisasi
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian

#### 3.1.1 Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tetap

Hasil inventarisasi aset menciptakan suatu laporan berwujud Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang berisikan data aset tetap antara lain: KIB A tentang tanah, KIB B tentang peralatan dan mesin, KIB C tentang gedung dan bangunan, KIB D tentang jalan, irigasi dan jaringan, KIB E tentang aset tetap lainnya, dan KIB F tentang konstruksi dalam pengerjaan. Kartu Inventarisasi Barang tersebut adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperbaiki administrasi inventarisasi aset di BKUD Kabupaten Semarang, serta penggunaan aplikasi SIPKD masih terus digunakan untuk mampu mempermudah tahapan inventarisasi aset tetap dan juga pengamanan administrasi inventarisasi aset mengalami peningkatan.

Proses pendataan aset tetap diantaranya adalah penguasaan, batas akhir penguasaan, masalah legal yang dimiliki, dan lain sebagainya. Proses inventarisasi yuridis/legal tetap wajib memiliki bukti kelengkapan atas kepemilikan aset tetap tersebut, agar dalam proses penguasaan atas aset tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat penguasaan aset tersebut. Selama proses dilaksanakannya inventarisasi aset merupakan hal yang penting dan sangat penting keberadaannya untuk aset tetap diantaranya adalah gedung dan bangunan, tanah, serta kendaraan. Aset tetap tanah harus mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau surat berharga lainnya yang sah menurut hukum, untuk gedung dan bangunan wajib mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Surat tersebut bidang didapatkan dari Badan Perizinan Daerah. Selain itu, rumah dinas sebagai aset tetap harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan Samsat Daerah harus dimiliki untuk kendaraan sebagai bukti kepemilikan.

Namun, dalam hal ini BKUD Kabupaten Semarang hanya difungsikan sebagai penyimpan dokumen baik itu berupa BPKB atas kendaraan dinas, dan juga hanya melakukan pengurusan atas surat pengantar perpanjangan STNK kendaraan dinas yang digunakan oleh pengguna barang.

### **3.1.2 Legal Audit Aset Tetap**

BKUD Kabupaten Semarang sudah berupaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan penggunaan dan pemanfaatan terhadap aset daerah oleh pengguna barang dalam hal ini pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan pembuatan surat berita acara penggunaan barang yang ditandatangani oleh pengguna barang dan diketahui kepala unit/ satuan kerja. Tujuan dari pembuatan berita acara tersebut agar pengguna barang lebih bertanggung jawab terhadap barang yang diamanatkan kepadanya dan jika kehilangan maupun kerusakan terjadi, maka pengguna barang harus mengganti aset tersebut. sistem dan prosedur penguasaan dan pengalihan aset tetap dilaksanakan dengan melaksanakan kerja sama bersama pihak di luar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dilakukan dengan sewa misalnya sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Semarang dan pinjam pakai peralatan dan mesin dan dilaksanakan dengan dasar undang-undang yang ada.

### **3.1.3 Penilaian Aset Tetap**

Proses penilaian aset tetap di lingkup pemerintahan Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh BKUD Kabupaten Semarang dalam hal pemusnahan ataupun penghapusan aset/BMD yang dinilai sudah dalam keadaan rusak berat yang mengakibatkan barang tersebut tidak layak pakai atau dipergunakan untuk pelaksanaan jalannya proses pemerintahan di Kabupaten Semarang, oleh karena itu BKUD membuat langkah prosedur dalam pemusnahan dan penghapusan aset yakni meliputi langkah awal yang dimulai dengan penerimaan usulan dari masing-masing OPD terkait yang menyatakan bahwa aset/BMD telah mengalami rusak berat disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan aset/BMD tersebut dalam keadaan rusak berat, kemudian dari pihak BKUD membentuk tim pemusnahan untuk melakukan survey ke lapangan untuk mengecek kondisi barang tersebut benar-benar rusak, selanjutnya tim melaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan membuat surat persetujuan kepada Bupati, dan apabila telah disetujui maka akan di dibuatkan usulan pemusnahan dan di dibuatkan berita acara kemudian pembuatan Surat Keputusan (SK) penghapusan dari DBMD.

### **3.1.4 Optimalisasi Aset Tetap**

Langkah yang diambil oleh BKUD Kabupaten Semarang dalam optimalisasi fungsi aset yaitu dengan melakukan sistem sewa, misalnia penyewaan atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta alat-alat mesin dan perlengkapan kepada masyarakat dan juga melakukan kerjasama pemanfaatan yang dimana BKUD Kabupaten Semarang menggandeng investor agar melakukan investasi terhadap aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dapat meningkatkan potensi dan nilai guna dari aset dan secara tidak langsung akan menaikkan PAD Kabupaten Semarang.

Tindakan optimalisasi aset yang dilakukan oleh BKUD Kabupaten Semarang tersebut juga bisa menopang fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang. Jika kesejahteraan masyarakat telah tercapai secara tidak langsung akan membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam memelihara potensi fisik aset tetap di Kabupaten Semarang, akibatnya dalam hal mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Semarang bisa tercapai dan bisa terealisasikan dengan sempurna hal tersebut karena adanya simpati dari masyarakat dalam menciptakan pengelolaan aset tetap yang memadai dan baik.

### **3.1.5 Pengawasan dan Pengendalian**

Tahapan akhir dalam mengelola aset yaitu dengan mengawasi dan mengendalikan. Tujuan dari proses pengawasan yaitu untuk mencegah adanya kesalahan saat pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh BKUD Kabupaten Semarang. Di sisi lain, pengendalian aset dilaksanakan untuk menanggung pelaksanaan dalam pengelolaan aset, maka jika kesalahan terjadi bisa dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut demi mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset di Kabupaten Semarang. Dengan adanya pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan aset membuat penanganan atas aset bisa terkendali dan terkontrol dengan gambling. Mulai dari ranah penanganan hingga siapa saja yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pada saat mengelola aset hingga hal tersebut diharapkan mampu memperkecil munculnya peluang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan aset di lingkup pemerintahan daerah.

### **3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam mempertahankan Opini WTP pada BKUD Kabupaten Semarang**

Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan fakta bahwa pada proses pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh BKUD Kabupaten Semarang tidak selalu bergerak sesuai dengan harapan, dimana ada beberapa hambatan terjadi saat pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BKUD Kabupaten Semarang. BKUD Kabupaten Semarang mengalami hambatan yang sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam memperoleh dokumen ataupun kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang
2. Kurangnya dari pegawai BKUD dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
4. Koneksi jaringan SIPKD Modul Aset sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan

### **3.3. Upaya yang dilakukan BKUD guna mengatasi Hambatan dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap**

BKUD Kabupaten Semarang telah menjalankan pengelolaan aset dengan maksimal sesuai dengan peraturan normatif, Konsep pengelolaan, dan didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP). Selain itu pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan pengguna barang tiap-tiap OPD telah melaksanakan tugasnya selaras dengan peraturan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap masih terdapat beberapa hambatan serta kendala yang membuat BKUD khususnya pada bidang aset sebagai pembantu pengelola menjalankan perbaikan untuk memaksimalkan pengelolaan aset tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka mempertahankan opini WTP.

Upaya yang dilaksanakan BKUD Kabupaten Semarang dalam mengatasi permasalahan atau hambatan saat mengelola aset tetap di Kabupaten Semarang diantaranya adalah :

1. Melengkapi Dokumen atau Tanda Bukti Kepemilikan Atas Aset tetap pemerintah kabupaten semarang
2. Mengajukan usulan tambahan formasi personil di bidang aset
3. Meningkatkan kompetensi bagi personil pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kerjasama dengan pemkab/pemkot lain.
4. Memaksimalkan SIPKD Modul Aset serta Merintis Penerapan Aplikasi E-BMD

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Optimalisasi pengelolaan aset tetap tidak lepas dari upaya pemerintah kabupaten semarang dalam mengatasi kendala yang ada. BKUD Kabupaten Semarang telah menjalankan pengelolaan aset dengan maksimal sesuai dengan peraturan normatif, Konsep pengelolaan, dan didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP). Selain itu pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan pengguna barang tiap-tiap OPD telah melaksanakan tugasnya selaras dengan peraturan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap masih terdapat beberapa hambatan serta kendala yang membuat BKUD khususnya pada bidang aset sebagai pembantu pengelola menjalankan perbaikan untuk memaksimalkan pengelolaan aset tetap di lingkup pemerintahan kabupaten semarang dalam rangka mempertahankan opini WTP.

Pertama, hal penting yang perlu diperhatikan saat mengurus BMD adalah bukti kepemilikan atau kelengkapan dokumen. Karena itu, jika dokumen tidak lengkap maka proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BKUD jadi terhambat. Kemudian, kekurangan personil atau pegawai di BKUD terkhusus bidang aset juga mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan aset menjadi terhambat, maka dari itu, usulan tambahan formasi personil di bidang aset perlu dilakukan pengajuan. Selanjutnya upaya BKUD Kabupaten Semarang untuk meningkatkan potensi pegawai di bagian aset dilakukan melalui diklat atau pelatihan agar serta pelaksanaan Kerjasama (Studi Banding) dengan Pemkab/Pemkot lain yang lebih maju, diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan pegawai yang nantinya bisa melakukan pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan oleh BKUD sehingga upaya dalam mempertahankan opini WTP dapat tercapai. BKUD Kabupaten Semarang juga terus berupaya untuk mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri dengan mengikuti pembaruan yang telah disesuaikan dengan peraturan yang ada dalam hal ini Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan BMD namun juga memaksimalkan aplikasi SIPKD Modul Aset yang masih digunakan saat ini. Penerapan E-BMD sebagai modul baru pengelolaan aset di Pemerintahan Kabupaten Semarang dengan harapan agar proses pelaksanaan inventarisasi aset bisa dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan juga akurat. Dan terakhir, upaya yang dilaksanakan BKUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan proses inventarisasi aset dilingkungan pemerintah Kabupaten Semarang yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi secara manual semua itu diakibatkan dari aplikasi SIPKD Modul Aset yang belum terintegrasi keseluruh OPD di Kabupaten Semarang. Proses manual yang dilakukan yakni dengan mendatangi satu per satu OPD yang belum menyetorkan data inventaris asetnya.

### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat optimalisasi pengelolaan aset tetap yakni sulitnya mendapatkan dokumen bukti kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengelolaan aset tetap, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Koneksi jaringan dan SIPKD sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang sudah cukup baik meski ada beberapa hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang, salah satu kendala utama yang dihadapi BKUD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yakni sulitnya mendapatkan kelengkapan bukti aset tetap sebagai dokumen yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten atau masih terdapat beberapa tanah yang hingga saat ini tidak ada sertifikatnya, melalui hambatan tersebut membuat BKUD Kabupaten Semarang mengalami kendala untuk mengelola aset tetap. Berbagai upaya yang dilakukan oleh BKUD Kabupaten Semarang yakni dengan melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses penerbitan sertifikat tanah yang dimana proses penerbitan sertifikat untuk aset tetap tanah telah dianggarkan oleh BKUD Kabupaten Semarang tiap tahunnya, kabupaten semarang menargetkan aset tanah sepenuhnya memiliki sertifikat pada tahun 2025.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Siregar (2016).

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### 1) BUKU-BUKU DAN JURNAL

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th Edition ed.). California: Sage Publishing.
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah*. CV. Batam Publisher.
- Erlina, Rambe and Rasdianto (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif (2007) *Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5. Jakarta. Bumi Aksara
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, edisi revisi. Jakarta : penerbit PPM.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, N. (2002) *Ilmu pendidikan teoritis dan praktis*. Bandung: Remaja Karya.
- Sinurat, M. (2015) *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Pustaka Rahmat.
- Siregar, D. D. (2016) *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Sinergi Manajemen Aset (ASET).
- Sugiyono (2013) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

## 2) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan BMD  
Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan BMD  
Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah  
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD  
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang  
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang : Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Semarang

## 3) LAIN-LAIN

- Arum, M. A. N. S. (2015) 'PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH', pp. 1–21.
- Asman, H. (2018) 'PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP PADA STIKes MEGA REZKY MAKASSAR', Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, pp. 37–39. Available at: [https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept\\_cost\\_estimate\\_accepted\\_031914.pdf](https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf).
- Basri, H. (2021) 'Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah', REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), pp. 86–105. doi: 10.29103/reusam.v9i1.4869.
- Djaenuri, A. (2015) 'Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah', Sistem Pemerintahan Daerah, 3, pp. 1–46.
- Fallis, A. . (2013) 'Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia', Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), pp. 1689–1699.
- George, M., Gosal, R. and Sambiran, S. (2017) 'Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat', Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(2).